

BAB I

PENDAHULUAN

Kabupaten Lamandau merupakan kabupaten pemekaran yang berdiri bersama 7 (tujuh) Kabupaten pemekaran lainnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002. Dari 8 (delapan) Kabupaten yang berdiri tersebut, 7 (tujuh) kabupaten lainnya berasal dari status wilayah/Administratif Pembantu Bupati, sedangkan Kabupaten Lamandau satu-satunya kabupaten yang berasal dari kecamatan.

Dengan berangkat dari wilayah setingkat kecamatan tersebut, jika dibandingkan dengan 7 (tujuh) kabupaten pemekaran lainnya di Provinsi Kalimantan Tengah, kondisi awal Kabupaten Lamandau berada setingkat di bawah 7 (tujuh) kabupaten pemekaran lainnya.

Namun pada perkembangan Kabupaten Lamandau yang akan memasuki usia 16 tahun ini, Pemerintah Kabupaten Lamandau bersama DPRD Kabupaten Lamandau dan seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Lamandau, dengan semangat "Bahaum Bakuba" telah melaksanakan pembangunan secara bertahap dan hasilnya dapat dilihat adanya perubahan pola hidup masyarakat di berbagai sektor, yang menunjukkan perkembangan ke arah yang lebih baik dari sebelumnya.

Mengacu kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 67 menyatakan bahwa kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Selanjutnya, Pasal 71 ayat (2) menyatakan Kepala daerah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Secara prinsip LKPJ merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang telah dilaksanakan oleh Kepala Daerah kepada masyarakat yang direpresentasikan oleh DPRD, sesuai dengan dokumen perencanaan kegiatan yang telah tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

LKPJ Kepala Daerah sekurang-kurangnya berisi penjelasan mengenai: (i) Kebijakan Umum Anggaran (KUA); (ii) Pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah; (iii) Penyelenggaraan urusan desentralisasi; (iv) Penyelenggaraan tugas pembantuan; dan (v) Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

A. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Lamandau Tahun 2017 sebagai berikut:

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2016;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 05 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2017;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 07 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 – 2018;
18. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 34 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

3) Kehutanan	:	585.292 Ha
4) Perumahan/Danau/Sungai/Rawa	:	23.900 Ha
5) Hutan Tanaman Industri	:	3.640 Ha

d. Pembagian Administrasi Pemerintahan

Kabupaten Lamandau yang semula hanya terdiri dari 3 (tiga) kecamatan (Kec. Bulik, Kec. Lamandau, Kec. Delang), 3 (tiga) Kelurahan, dan 82 Desa. Pada tahun 2005, 3 (tiga) kecamatan tersebut dimekarkan menjadi 8 (delapan) Kecamatan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 05 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Mentohi Raya, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Belantikan Raya dan Kecamatan Batang Kawa (Lembaran Daerah Nomor 05 Tahun 2005).

Selanjutnya pada tahun 2009, Dusun Batu Hambawang yang berada di Kecamatan Sematu Jaya berubah statusnya menjadi Desa definitif sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa Batu Hambawang di Kecamatan Sematu Jaya.

Kemudian pada tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Lamandau membentuk Desa baru berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 4 Tahun 2013 tentang pembentukan Desa Hulu Jojabo di Kecamatan Delang, Desa Samu Jaya di Kecamatan Lamandau, Desa Perigi Raya dan Desa Nanga Pamalontian di Kecamatan Bulik dan Desa Rimba Jaya di Kecamatan Sematu Jaya. Kelima desa ini menjadi definitif dengan keluarnya Permendagri Nomor 39 Tahun 2015 tentang kode dan data wilayah administratif pemerintahan. Saat ini jumlah desa yang berada di 8 (delapan) kecamatan di Kabupaten Lamandau berjumlah 85 desa dan 3 kelurahan.

Tabel 1.1

Jumlah dan Luas wilayah Kecamatan, Kelurahan dan Desa

NO	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	LUAS WILAYAH (Km ²)	KETERANGAN
1	Bulik		665,55	Kec. Induk
		1. Nanga Bulik	75,02	Kelurahan
		2. Kujan	30,10	Desa
		3. Guci	103,00	Desa
		4. Batu Kotam	61,58	Desa
		5. Bumi Agung	8,20	Desa
		6. Sumber Mulya	7,25	Desa
		7. Bukit Indah	15,00	Desa
		8. Arga Mulya	21,50	Desa
		9. Bunut	108,00	Desa
		10. Sungai Mentawa	103,00	Desa
		11. Beruta	18,40	Desa
		12. Tamiang	108,00	Desa
		13. Perigi Raya	3,00	Desa
14. Nanga Pamalontian	3,5	Desa		

NO	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	LUAS WILAYAH (Km ²)	KETERANGAN
2.	Lamandau		1.333,00	Kec. Induk
		1. Tapin Bini	174,9	Kelurahan
		2. Kawa	163,00	Desa
		3. Penopa	125,00	Desa
		4. Suja	185,00	Desa
		5. Sekoban	144,00	Desa
		6. Bakonsu	91,00	Desa
		7. Cuhai	142,00	Desa
		8. Karang Taba	142,00	Desa
		9. Tanjung Beringin	82,00	Desa
		10. Sungai Tuat	76,00	Desa
	11. Samu Jaya	8,1	Desa	
3.	Delang		685,00	Kec. Induk
		1. Kudangan	67,00	Kelurahan
		2. Sepoyu	111,00	Desa
		3. Riam Tinggi	43,00	Desa
		4. Landau Kantu	35,00	Desa
		5. Nyalang	95,00	Desa
		6. Lopus	36,00	Desa
		7. Kubung	36,00	Desa
		8. Sekombulan	60,00	Desa
		9. Riam Panahan	101,00	Desa
		10. Penyomba	90,00	Desa
	11. Hulu Jojabo	11,00	Desa	
4.	Bulik Timur		1.074,72	Kec. Pemekaran
		1. Merambang	112,00	Desa
		2. Batu Tunggul	105,00	Desa
		3. Nanga Kemujan	101,00	Desa
		4. Sepondam	98,00	Desa
		5. Toka	107,00	Desa
		6. Nanga Koring	104,00	Desa
		7. Sungkup	111,00	Desa
		8. Nanga Palikodan	105,00	Desa
		9. Nuangan	103,00	Desa
		10. Pedongatan	108,00	Desa
		11. Suka Maju	8,00	Desa
	12. Bukit Jaya	12,72	Desa	
5.	Menthobi Raya		620,88	Kec. Pemekaran
		1. Melata	110,00	Desa
		2. Nanuah	102,00	Desa
		3. Topalan	44,00	Desa
		4. Batu Ampar	94,00	Desa
		5. Lubuk Hiju	123,00	Desa
		6. Bukit Makmur	7,00	Desa
		7. Bukit Raya	60,00	Desa
	8. Modang Mas	27,25	Desa	

NO	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	LUAS WILAYAH (Km ²)	KETERANGAN
		9. Mukti Manunggal	21,63	Desa
		10. Sumber Jaya	15,00	Desa
		11. Bukit Harum	17,00	Desa
6.	Sematu Jaya		86,85	Kec. Pemekaran
		1. Purwareja	25,40	Desa
		2. Bina Bhakti	6,50	Desa
		3. Tri Tunggal	8,00	Desa
		4. Jangkar Prima	14,00	Desa
		5. Mekar Mulya	9,95	Desa
		6. Wonorejo	8,00	Desa
		7. Batu Hambawang	15,00	Desa
		8. Rimba Jaya	29,00	Desa
7.	Belantikan Raya		1.263,00	Kec. Pemekaran
		1. Bayat	99,00	Desa
		2. Nanga Belantikan	93,00	Desa
		3. Sungai Buluh	53,00	Desa
		4. Belibi	70,00	Desa
		5. Karang Besi	124,00	Desa
		6. Benuatan	103,00	Desa
		7. Kahingai	82,00	Desa
		8. Nanga Matu	114,00	Desa
		9. Petarikan	228,00	Desa
		10. Sumber Cahaya	8,00	Desa
		11. Bintang Mengalih	196,00	Desa
		12. Tangga Batu	93,00	Desa
8.	Batangkawa		685,00	Kec. Pemekaran
		1. Kinipan	54,00	Desa
		2. Ginih	61,00	Desa
		3. Batu Tambun	85,00	Desa
		4. Benakitan	80,00	Desa
		5. Liku	85,00	Desa
		6. Mengkalang	65,00	Desa
		7. Karang Mas	105,00	Desa
		8. Kina	116,00	Desa
		9. Jemuat	34,00	Desa
		JUMLAH	6.414,00	

Luas wilayah Kabupaten Lamandau pada perkembangannya mengalami perubahan berdasarkan data tata batas antar kabupaten. Luas yang semula 6.414 Km² bertambah menjadi 7.846,91 Km² (luas indikatif). Sampai dengan tahun 2017 batas wilayah yang sudah definitif adalah dengan Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat sedangkan yang masih indikatif adalah dengan Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.

Tabel 1.2

Luas Wilayah Kecamatan Berdasarkan Batas Indikatif

NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (Km ²)
1	Bulik	851
2	Lamandau	1.311,89
3	Delang	520,93
4	Bulik Timur	1.651,53
5	Menthobi Raya	960,63
6	Sematu Jaya	242,43
7	Belantikan Raya	1.665,76
8	Batang Kawa	642,74
Kabupaten Lamandau		7.846,91

Sumber : Dinas PU Kabupaten Lamandau Bidang Tata Ruang, 2016

e. Topografi

Kondisi topografi Kabupaten Lamandau yaitu terdiri dari rawa dataran rendah, dataran tinggi dan perbukitan, yang juga dialiri oleh beberapa sungai besar maupun kecil yang masih menjadi urat nadi perekonomian di Lamandau.

Permukaan wilayah Lamandau sebagian besar adalah berupa daratan yang relatif bergelombang dengan transisi antara 0 – 25%. Kondisi ini merupakan bentukan dari perbukitan lemah yang banyak dijumpai pada wilayah sebelah barat. Sedangkan cekungan dapat ditemukan pada daerah yang masih berupa rawa. Geologi permukaan tanah di kawasan Lamandau terdiri dari lapisan humus, jenis tanah latosol dan podsolik merah kuning yang tahan erosi namun memiliki tingkat resapan yang sangat kecil. Ketinggian wilayah bervariasi antara 25 – 500 meter dari permukaan laut.

Tingkat kesuburan lahan di Kabupaten Lamandau yang berada antara kelas II sampai dengan kelas III, sangat memungkinkan untuk dikembangkan dan ditingkatkannya kegiatan Sektor Pertanian terutama Sub Sektor Tanaman Bahan Makanan dan Sub Sektor Tanaman Perkebunan.

Wilayah Kabupaten Lamandau memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, khususnya potensi bahan tambang seperti bijih besi, emas, galena bauksit, serta jenis mineral ikutan lainnya seperti Zync, Pyrite, dan lain-lain. Dari total luas Lamandau sebesar 6.414.400 Ha tercatat 120.242 Ha yang telah dikelola oleh kuasa pertambangan.

Kabupaten Lamandau termasuk daerah yang beriklim tropis Type A berdasarkan zone iklim, yaitu jumlah bulan basah lebih banyak dibandingkan dengan bulan kering. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Juni sampai bulan September, sedangkan musim hujan terjadi pada bulan Oktober sampai dengan Mei. Curah hujan berkisar antara 2.000 – 2.500 mm/tahun. Curah hujan tertinggi pada bulan Maret dan terendah pada bulan Juli. Suhu udara antara 23° – 32°C dengan suhu rata-rata 27,48°C, dengan suhu maksimum berkisar antara 31° - 33°C

dan minimum antara 21,9° - 23,4°C. Kelembaban udara berkisar antara 81% - 89%, yang berarti tergolong daerah yang memiliki udara yang cukup lembab. Kecepatan angin 0,4 – 0,7 knot.

Untuk kondisi hidrologi Kabupaten Lamandau terdiri dari sungai-sungai baik besar maupun kecil. Salah satu aliran sungai terbesar yang melalui wilayah Kabupaten Lamandau adalah Sungai Lamandau dengan beberapa anak sungai. Sungai Lamandau beserta anak-anak sungainya memiliki fungsi utama sebagai jalur transportasi masyarakat dan sumber mata pencaharian serta aktivitas kehidupan sehari-hari.

Tabel 1.3
Sungai di Kabupaten Lamandau

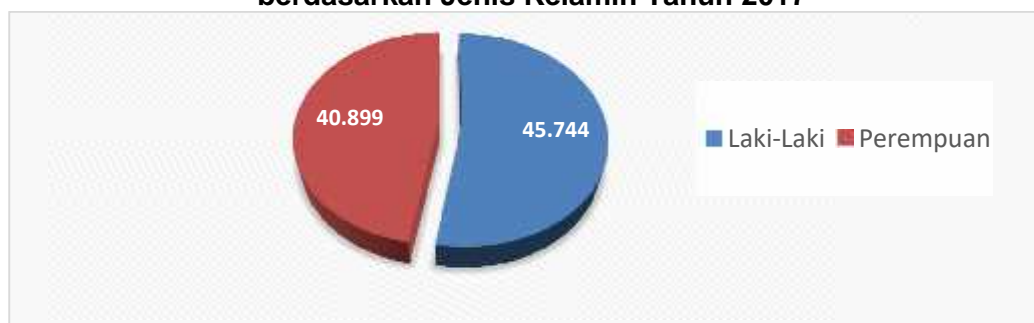
No.	Nama Sungai	Panjang (km)	Dapat Dilayari (km)	Rata-rata	
				Kedalaman (m)	Lebar (m)
1	Sungai Bulik	45	45	5	30
2	Sungai Lamandau	65	65	6	65
3	Sungai Belantikan	52	52	4	23
4	Sungai Matu	21	21	3,5	8
5	Sungai Batang Kawa	65	65	6	25
6	Sungai Delang	57	40	5	18
7	Sungai Kungkung	20	-	2	4

Sumber: BPS Kabupaten Lamandau

2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS

Penduduk Kabupaten Lamandau berdasarkan data SIAK Dinas Dukcapil tahun 2017 mencapai 86.643 jiwa terdiri dari Laki-laki 45.744 jiwa (52,80%) dan Perempuan 40.899 jiwa (47,20%), sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Lamandau tahun 2016 mencapai 85.772 jiwa terdiri dari laki-laki 45.317 jiwa (52,83%) dan Perempuan 40.455 jiwa (47,17%), sehingga laju pertumbuhan penduduk (LPP) Kabupaten Lamandau adalah sebesar 1,02% .

Gambar 1.2
Diagram Perbandingan Penduduk Kabupaten Lamandau berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2017



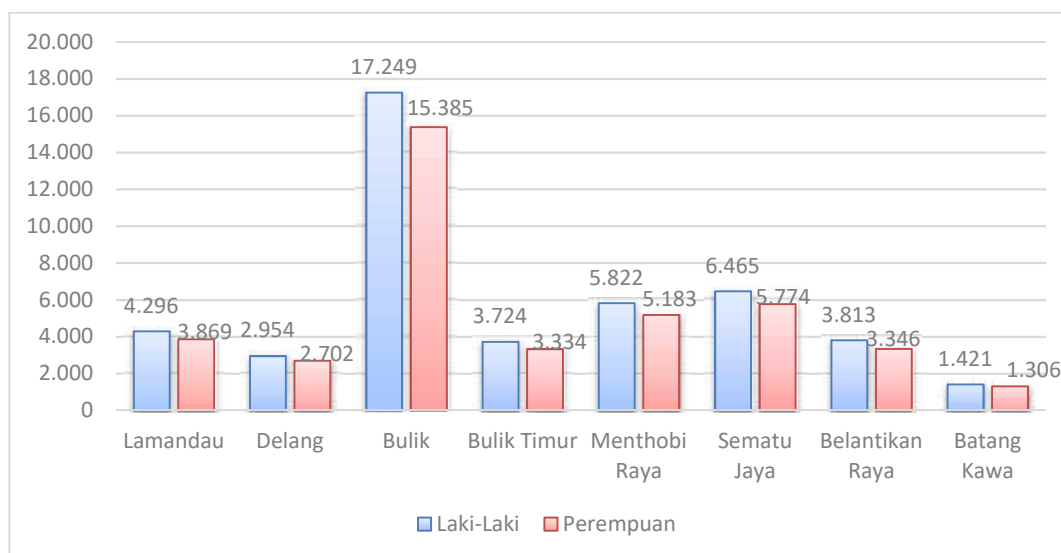
Adapun Rincian jumlah penduduk per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.4
Jumlah Penduduk Kab.Lamandau Per Kecamatan Tahun 2017

No.	Kecamatan	KK	Penduduk (Jiwa)		
			Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Lamandau	2.766	4.296	3.869	8.165
2.	Delang	1.809	2.954	2.702	5.656
3.	Bulik	11.190	17.249	15.385	32.634
4.	Bulik Timur	2.290	3.724	3.334	7.058
5.	Menthobi Raya	3.570	5.822	5.183	11.005
6.	Sematu Jaya	3.870	6.465	5.774	12.239
7.	Belantikan Raya	2.332	3.813	3.346	7.159
8.	Batang Kawa	864	1.421	1.306	2.727
Total		28.691	45.744	40.899	86.643

Sumber: SIAK Dinas DUKCAPIL Kabupaten Lamandau 2018.

Gambar 1.3
Diagram Perbandingan Penduduk
berdasarkan Jenis Kelamin Per Kecamatan Tahun 2017



Tabel 1.5
Laju Pertumbuhan Penduduk Kab. Lamandau
Tahun 2011-2017

No.	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	LPP %
1.	2011	75.516	2,94
2.	2012	80.602	6,73
3.	2013	83.502	3,60
4.	2014	87.805	5,15
5.	2015	89.022	1,39
6.	2016	85.772	-3,79
7.	2017	86.643	1,02

Sumber: SIAK Dinas DUKCAPIL Kabupaten Lamandau 2018

Gambar 1.4
Grafik Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Lamandau
Tahun 2011-2017



Untuk melihat bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya dapat dilihat dari salah satu indikator pembangunan yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Terdapat 3 (tiga) dimensi dasar pembentuk IPM, yakni umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*).

Pada tahun 2010, *United Nations Development Programme (UNDP)* mengubah metodologi perhitungan IPM, baik komponen maupun agregasinya. Tiga dimensi penyusun IPM tersebut antara lain: *indeks kesehatan* yang diukur dengan angka harapan hidup pada saat lahir (AHH), *indeks pendidikan* yang diukur dengan kombinasi antara harapan lama sekolah (HLS) yang dihitung pada usia 7 tahun keatas menggantikan angka melek huruf (AMH) dan rata-rata lama sekolah (RLS) pada penduduk 25 tahun keatas, dan indeks pengeluaran yang diukur dengan pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (metode baru menggunakan 96 komoditas, dimana 66 adalah komoditas makanan dan sisanya nonmakanan).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Lamandau terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang menunjukkan pembangunan manusia di Kabupaten Lamandau mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2016 sebesar 68,54 jika dibandingkan dengan IPM tahun 2012 sebesar 66,49 maka selama kurun waktu lima tahun telah terjadi peningkatan sebesar 2,05. Kondisi tersebut didukung oleh meningkatnya angka harapan hidup (lamanya hidup), meningkatnya tingkat pengetahuan berupa harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah serta meningkatnya standar hidup yang layak berupa pengeluaran konsumsi per kapita yang disesuaikan.

Tabel 1.6
Perkembangan IPM, AHH, HLS, RLS dan Pengeluaran Per kapita Kabupaten
Lamandau Tahun 2012 – 2016

TAHUN	IPM	Angka Harapan Hidup (AHH) (Tahun)	Harapan Lama Sekolah (HLS) (%)	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	Pengeluaran Per kapita yang disesuaikan (Rp. 000)
2012	66,49	68,90	11,34	7,38	9.837,38
2013	67,23	68,98	11,75	7,55	9.881,25
2014	67,53	69,07	11,80	7,67	9.925,31
2015	68,30	69,12	12,43	7,68	9.998,00
2016	68,54	69,20	12,44	7,79	10.049,00

Sumber: IPM Kabupaten Lamandau 2016/2017

Angka IPM Kabupaten Lamandau tahun 2016 sebesar 68,54 menurut skala internasional masuk dalam kategori sedang (60,00-69,99) dan menempati urutan ke-7 di wilayah Kalteng setelah Kota Palangka Raya, Kotawaringin Barat, Barito Timur, Gunung Mas, Kotawaringin Timur dan Barito Selatan.

Sebagai salah satu indikator kesehatan, angka harapan hidup (AHH) digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia yang diartikan sebagai umur yang mungkin dicapai seseorang yang lahir pada tahun tertentu. Tinggi rendahnya AHH sangat dipengaruhi oleh perilaku hidup, gizi, serta kondisi lingkungan seseorang. Makin meningkatnya pelayanan, ketersediaan dan akses kemudahan terhadap pelayanan kesehatan, maka sangat berpengaruh terhadap AHH seseorang.

Pada tahun 2012 AHH Kabupaten Lamandau sebesar 68,90 tahun, kemudian meningkat 68,98 tahun pada tahun 2013 dan terus meningkat hingga pada tahun 2016 mencapai 69,20 tahun, artinya pada tahun 2016, rata-rata umur penduduk lebih panjang 0,3 tahun dibanding AHH tahun 2012. Peningkatan ini tidak lepas dari upaya Pemerintah Kabupaten Lamandau, melalui Dinas melaksanakan berbagai program peningkatan kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat dan pengelolaan lingkungan sehat serta peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan.

Komponen pembentuk IPM yang kedua yaitu meningkatnya Harapan Lama Sekolah (HLS) yang dihitung pada anak usia 7 tahun keatas untuk mengikuti kebijakan program wajib belajar milik pemerintah. Indikator ini menggambarkan kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang.

HLS Kabupaten Lamandau pada tahun 2012 sebesar 11,34 persen sedangkan tahun 2016 sebesar 12,44 persen, artinya dalam lima tahun ini persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis meningkat 1,1 persen. Peningkatan ini disebabkan karena usaha dari Pemerintah Kabupaten Lamandau untuk menciptakan penduduk yang memiliki sumber daya yang lebih berkualitas melalui berbagai program yang dilaksanakan Dinas Pendidikan dan Pengajaran seperti penambahan jumlah guru, peningkatan kualitas sumber daya tenaga pengajar, penambahan sarana dan prasarana pendidikan, serta program lainnya.

Selanjutnya, rata-rata lama sekolah (RLS) merupakan ukuran yang lebih nyata dalam mengukur kualitas sumber daya manusia. Indikator ini merupakan kumulatif jumlah tahun yang ditempuh oleh seseorang dalam mengikuti pendidikan formal yang dihitung sampai jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan atau kelas/tingkat tertinggi yang pernah diduduki. RLS mengindikasikan makin tingginya pendidikan yang dicapai oleh masyarakat di suatu daerah. Untuk meningkatkan RLS pemerintah telah mencanangkan program Wajib Belajar 9 Tahun atau pendidikan dasar sampai dengan tingkat SLTP.

Karena rata-rata lama sekolah yang dipakai mengikuti standar internasional UNDP yaitu mencakup penduduk usia tua yang sebagian besar tidak menamatkan SD, maka RLS di Kabupaten Lamandau sebesar 7,79 tahun yang berarti pada umumnya penduduk usia 25 tahun keatas di Kabupaten Lamandau menempuh pendidikan sampai kelas satu SMP.

RLS tahun 2012 sebesar 7,38 tahun, kemudian terus mengalami peningkatan setiap tahun dan pada tahun 2016 naik menjadi 7,79 tahun. Peningkatan RLS ini mengindikasikan kesadaran dari masyarakat Kabupaten Lamandau terhadap program pemerintah mengenai program wajib belajar 9 tahun semakin meningkat.

Selain HLS dan RLS, parameter keberhasilan pembangunan pendidikan juga ditandai dengan meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). APK menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Bila dilihat pada setiap jenjang pendidikan, APK tertinggi terdapat pada tingkat SD dan terendah pada tingkat SMA/SMK. Hal ini dapat disimpulkan bahwa walaupun belum seluruh masyarakat bersekolah sesuai dengan jenjang pendidikannya, namun tingkat kesadaran penduduk akan pendidikan, terutama pada usia SD relatif cukup tinggi. Hal ini juga sangat berkaitan dengan keberhasilan pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun.

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan antara jumlah penduduk kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Semakin tinggi APM berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah pada tingkat pendidikan tertentu. Nilai ideal APM untuk semua jenjang adalah sekitar 100% atau lebih. APM digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan yang sesuai.

Adapun APK dan APM Tahun 2013 sampai dengan dan Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.7
Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)
Tahun 2013-2015 tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK

No.	Tahun	Tingkat Sekolah					
		SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA/SMK	
		APK	APM	APK	APM	APK	APM
1.	2013	104,07	93,29	94,18	73,56	75,36	57,97
2.	2014	103,46	96,87	76,71	63,45	75,50	42,81
3.	2015	113,53	98,65	83,76	75,79	59,46	50,02
4.	2016	100,47	87,79	102,20	76,17	81,67	76,51
5.	2017	102,58	102,14	133,28	90,64		

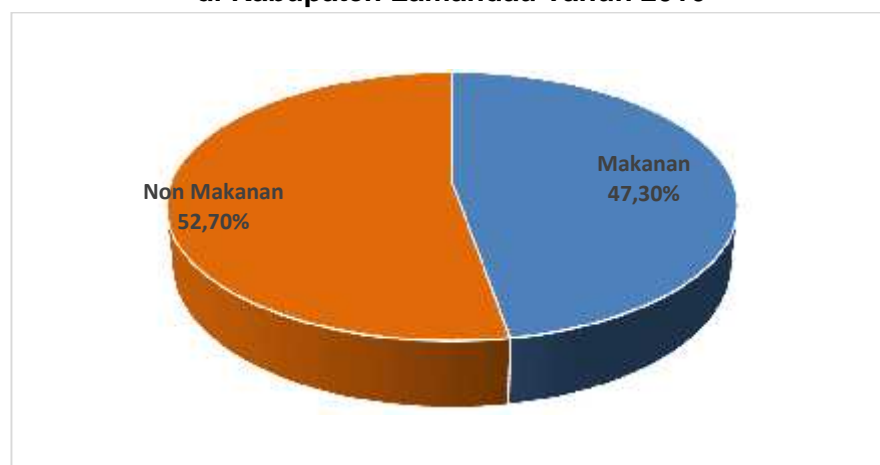
Sumber: Dinas DIKJAR Kabupaten Lamandau 2018

Dari tabel diatas tahun 2017 menunjukkan bahwa APK pada jenjang pendidikan SD/MI terdapat 2,58 persen penduduk yang berusia diluar 7 – 12 tahun yang bersekolah di SD/MI. Untuk APM tertinggi tahun 2017 terdapat pada jenjang pendidikan SD/MI yang menunjukkan bahwa terdapat 102,14 persen penduduk berusia 7 – 12 tahun yang bersekolah di SD/MI. Sedangkan APK dan APM SMA tahun 2017 tidak diperoleh data karena adanya perubahan kewenangan pengelolaan SMA/SMK ke Provinsi Kalimantan Tengah.

Komponen pembentuk IPM lainnya yaitu Pengeluaran Per kapita yang disesuaikan, dimana komponen ini memberikan gambaran tingkat daya beli masyarakat. Tingkat kesejahteraan dikatakan meningkat jika terjadi peningkatan Pengeluaran Per kapita yaitu peningkatan nominal pengeluaran rumah tangga lebih tinggi dari tingkat inflasi pada periode yang sama. Menurunnya tingkat pendapatan berakibat makin besarnya jumlah penduduk yang hidup tidak sesuai dengan standar hidup layak atau berada di bawah garis kemiskinan.

Pada tahun 2016, prioritas pengeluaran penduduk Kabupaten Lamandau masih didominasi untuk non makanan yaitu 52,70 persen, sementara untuk konsumsi makanan sebesar 47,30 persen.

Gambar 1.5
Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Rumah Tangga
di Kabupaten Lamandau Tahun 2016



Sumber : Analisis Pertumbuhan Pembangunan Manusia Kabupaten Lamandau 2016/2017.

3. KONDISI EKONOMI

Salah satu indikator kinerja pembangunan suatu daerah diukur melalui indikator-indikator makro ekonomi yang secara umum telah diakui dan diberlakukan. Pencapaian perekonomian suatu daerah merupakan gambaran dari prestasi pemerintahan daerah dalam memanfaatkan potensi yang ada di daerah tersebut, serta upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang ada di daerah. Indikator pencapaian pembangunan ekonomi yang secara umum diakui adalah : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan tingkat inflasi, tingkat kemiskinan.

Sektor yang memiliki kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Lamandau tidak terlepas dari potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Lamandau yaitu Pertanian (sub sektor Tanaman Bahan Makanan, Peternakan, Perikanan, Kehutanan dan Perkebunan), dan Pertambangan.

a. Potensi Unggulan Daerah

Pada umumnya potensi unggulan Kabupaten Lamandau adalah dari jenis komoditas Sektor Pertanian (sub sektor Kehutanan dan Perkebunan). Hal ini terutama didukung oleh 3 (tiga) faktor utama yaitu dukungan pasar ekspor, dukungan sumber daya manusia dan keterlibatan masyarakat. Berdasarkan hasil kajian produk unggulan daerah telah dilakukan identifikasi komoditas yang dihasilkan oleh masyarakat Kabupaten Lamandau sebagaimana tabel 1.8 dibawah ini.

Tabel 1.8
Komoditas Unggulan Kabupaten Lamandau

Sub Sektor	Komoditas Unggulan	Nilai LQ
Pertanian	Kedelai	3,6
	Kacang Hijau	2,5
Perkebunan dan Holtikultura	Lada	22,1
	Durian	9,9
Peternakan	Domba	9,6
	Kambing	4,7

Sumber : Buletin Litbang Kabupaten Lamandau tahun 2015

Karena banyaknya komoditas yang potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Lamandau berdasarkan hasil analisis LQ, maka komoditas yang diambil sebagai komoditas unggulan adalah komoditas prioritas yakni komoditas dengan nilai LQ tertinggi untuk masing – masing sub sektor, atau nilai LQ lebih besar satu. Khusus untuk tanaman sub sektor perkebunan dan holtikultura, komoditas durian dipilih sebagai pilihan kedua walaupun berdasarkan LQ berada pada urutan ketiga setelah duku, hal ini dilakukan pilihan dengan pertimbangan komoditas durian memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi.

Pariwisata juga menjadi salah satu Produk Unggulan Daerah dari hasil kajian tahun 2015. Berikut hasil analisa terhadap potensi sub sektor pariwisata di Kabupaten Lamandau dari hasil kajian Produk Unggulan Daerah :

Tabel 1.9
Potensi, Masalah dan Analisis Pengembangan Produk Unggulan Daerah

Potensi	Masalah	Analisis
Kabupaten Lamandau memiliki lanskap alami pegunungan perbukitan dengan hutan alami di bagian barat-utara serta terdapat potensi sungai dengan jeram dan air terjun.	<ul style="list-style-type: none"> - Jarak menuju tempat – tempat wisata tersebut relatif cukup jauh dengan kualitas jalan yang rendah dan ketersediaan moda yang terbatas - Tempat – tempat wisata masih belum dilengkapi fasilitas yang memadai 	Pariwisata merupakan sektor yang perlu untuk dikembangkan di Kabupaten Lamandau yang strategis untuk menunjang pengembangan pariwisata Kabupaten Lamandau perlu dibuat masterplan pariwisata Kabupaten Lamandau yang komprehensif di dalamnya memuat : Rencana Atraksi, Rencana Servis/Fasilitas, Rencana Transportasi, Rencana Informasi dan
Kabupaten Lamandau berdekatan dengan Kabupaten Kotawaringin Barat yang memiliki potensi wisata Taman Nasional Tanjung Putting (TNTP). Wisatawan lokal dan asing yang berwisata di TNTP memiliki alternatif wisata ke Kabupaten Lamandau	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya promosi terhadap potensi wisata yang terdapat di Kabupaten Lamandau - Belum optimalnya kerjasama antar pemerintah daerah dan pemerintah daerah dengan stakeholder di bidang pariwisata (agen perjalanan, biro wisata, dll) 	

Dengan adanya Produk Unggulan Daerah maka hal-hal yang dapat dicapai suatu wilayah yaitu:

- 1) Pengembangan sektor ekonomi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien karena komoditas yang akan dikembangkan telah ditentukan berdasarkan potensi daerah.
- 2) Karena ditentukan berdasarkan potensi ekonomi masyarakat, maka PUD dapat dengan mudah dikembangkan.
- 3) Percepatan peningkatan perekonomian dapat tercapai dengan baik karena PUD ditentukan berdasarkan komoditas potensial yang memiliki nilai ekonomis tertinggi dalam wilayah.
- 4) Membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya terutama dalam industri pengelolaan PUD.

Berdasarkan fakta analisa, perencanaan pengembangan dan kesimpulan, maka direkomendasikan sebagai berikut :

- 1) Indikasi program yang disusun berlaku khusus untuk semua komoditi / produk unggulan yang sudah dikaji secara akademis sesuai prioritas, sebaiknya pengembangan dilaksanakan secara bertahap dan dengan komitmen yang tinggi dari pemerintah daerah melalui instansi teknis/SKPD terkait. Indikasi program dapat dipergunakan untuk pengembangan produk lain yang berpotensi akan

dikembangkan sebagai produk unggulan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Lamandau, seperti misalnya komoditi gaharu dan jengkol.

- 2) Komoditi lain ini bisa berpotensi sebagai produk unggulan tetapi penetapannya sebagai produk unggulan harus memperhatikan kondisi *existing* dan pengembangan produk turunannya, serta sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah.

b. Perkembangan Ekonomi Makro

Perekonomian di Kabupaten Lamandau hingga tahun 2016 secara umum bergerak ke arah yang lebih baik, ditandai dengan meningkatnya beberapa indikator makro ekonomi antara lain pertumbuhan Produk Domestik Regional Brutto (PDRB), pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita dan laju inflasi.

1) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Perkembangan PDRB Kabupaten Lamandau dari tahun 2012-2016 mengalami peningkatan. Berdasarkan harga konstan yaitu dari Rp. 2.358,67 milyar di tahun 2012, meningkat menjadi Rp. 3.076,70 milyar di tahun 2016, atau selama kurun waktu 5 (lima) tahun terjadi peningkatan sebesar Rp. 718,03 milyar. Sedangkan berdasarkan harga berlaku yaitu sebesar Rp. 2.725,29 milyar pada tahun 2012 meningkat menjadi Rp. 4.061,46 milyar pada tahun 2016, atau selama kurun waktu 5 (lima) tahun terjadi peningkatan sebesar Rp. 1.336,17 milyar.

PDRB ADHB menunjukkan pendapatan yang memungkinkan dapat dinikmati oleh penduduk suatu daerah serta menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun. Besarnya peran masing-masing kategori/lapangan usaha dalam pembentukan total PDRB ADHB mencerminkan struktur perekonomian wilayah yang bersangkutan. Pada tahun 2016, perekonomian Kabupaten Lamandau didominasi oleh 3 (tiga) kategori/lapangan usaha ekonomi yakni Pertanian, Kehutanan dan Perikanan berkontribusi 31,22 persen; Pertambangan dan Penggalan memberikan *share* sebesar 14,33 persen; dan Industri Pengolahan sebesar 12,65 persen. Lapangan usaha dengan kontribusi terbesar berikutnya adalah Konstruksi sebesar 12,46 persen dan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, dengan sebesar 8,45 persen. Sementara peranan lapangan usaha lainnya, masing-masing memberikan kontribusi yang cukup kecil yaitu dibawah 6 persen.

Selain itu, juga PDRB ADHB Kabupaten Lamandau pada tahun 2016 memberikan kontribusi sebesar 3,64 persen terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Tengah ADHB. Hanya empat kabupaten/kota saja yang mampu berperan di atas 10 persen, yaitu Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kapuas, dan Kota Palangka Raya, selebihnya masing-masing memberikan kontribusi berkisar antara 2,00 persen hingga 7,00 persen, termasuk

Kabupaten Lamandau yang berada di posisi ketiga terbawah setelah Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Pulang Pisau.

Tabel. 1.10
PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2012-2016

No.	Lapangan Usaha	PDRB ADH Berlaku (jutaan rupiah)				
		2012	2013	2014	2015	2016
A.	Pertanian, Kehutanan, dan perikanan	841.335,5	900.418,3	1.038.561,1	1.121.374,8	1.268.004,87
	1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	743.824,1	803.571,7	937.274,7	1.006.811,2	1.137.669,02
	a. Tanaman Pangan	74.213,2	76.723,3	83.662,3	87.886,2	105.686,93
	b. Tanaman Hortikultura	16.425,9	17.579,0	18.611,2	17.801,2	20.659,76
	c. Tanaman Perkebunan	576.128,1	622.322,0	738.973,0	792.875,4	889.279,92
	d. Peternakan	66.414,2	74.669,4	82.117,3	93.432,1	105.232,37
	e. Jasa Pertanian dan Perburuan	10.642,7	12.278,1	13.910,9	14.816,2	16.810,04
	2. Kehutanan dan Penebangan Kayu	78.326,9	75.329,4	77.235,2	86.633,7	97.915,08
	3. Perikanan	19.184,5	21.517,2	24.051,1	27.929,9	32.420,77
B.	Pertambangan dan Penggalian	534.916,1	638.462,7	608.295,0	591.027,4	582.100,80
	1. Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	-	-	-	-	-
	2. Pertambangan Batubara dan Lignit	-	-	-	-	-
	3. Pertambangan Bijih Logam	506.036,1	606.116,8	571.452,2	546.473,9	531.081,57
	4. Pertambangan dan Penggalian Lainnya	28.880,0	32.345,9	36.842,7	44.553,5	51.019,23
C.	Industri Pengolahan	312.441,3	341.951,3	401.328,4	450.949,2	513.672,71
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	340,8	331,6	380,4	530,6	614,96
	1. Ketenagalistrikan	291,0	277,2	319,3	462,9	539,81
	2. Pengadaan Gas dan Produksi Es	49,8	54,4	61,0	67,7	75,15
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	665,7	766,6	878,6	1.004,6	1.150,61
F.	Konstruksi	298.553,6	338.733,4	386.027,6	439.218,5	505.858,25
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	210.308,7	225.357,0	260.932,8	299.477,7	343.183,48
H.	Transportasi dan Pergudangan	70.219,9	73.908,6	80.686,4	91.525,4	101.137,37
	1. Angkutan Rel	-	-	-	-	-
	2. Angkutan Darat	37.739,8	41.414,8	48.167,8	56.096,4	63.602,82
	3. Angkutan Laut	-	-	-	-	-
	4. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	28.986,0	28.564,9	28.080,2	30.307,0	31.526,47
	5. Angkutan Udara	-	-	-	-	-
	6. Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	3.494,1	3.928,8	4.438,5	5.122,0	6.008,08
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	21.807,8	23.502,4	25.533,4	28.484,0	31.267,33
	1. Penyediaan AKomodasi	734,9	812,4	900,0	1.002,9	1.142,36
	2. Penyediaan Makan Minum	21.072,9	22.690,1	24.633,3	27.481,1	30.124,98
J.	Informasi dan Komunikasi	29.813,8	33.454,9	38.364,4	42.851,3	48.139,90
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	31.249,3	36.106,2	41.643,7	45.701,9	48.727,75
	1. Jasa Perantara Keuangan	21.149,2	24.796,9	28.866,4	31.738,6	34.188,98
	2. Asuransi dan Dana Pensiun	8.902,9	9.939,4	11.204,6	12.194,2	12.628,25
	3. Jasa Keuangan Lainnya	1.186,3	1.357,9	1.559,6	1.755,1	1.895,55
	4. Jasa Penunjang Keuangan	10,9	12,0	13,1	14,0	14,97
L.	Real Estate	31.774,0	34.804,9	38.187,4	41.677,5	45.905,69
M,N	Jasa Perusahaan	1.230,0	1.458,3	1.672,8	1.956,3	2.251,96
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	140.367,0	156.786,6	174.750,1	198.379,1	221.064,59
P.	Jasa Pendidikan	136.473,8	156.486,4	176.951,5	207.967,0	239.199,46
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	48.539,3	54.378,9	62.698,4	73.045,6	83.596,43
R,S, T,U	Jasa Lainnya	15.257,3	16.940,7	19.396,9	22.631,7	25.587,71
	JUMLAH	2.725.293,8	3.033.848,8	3.356.288,8	3.657.802,4	4.061.463,87

Sumber: Buku Analisis Ekonomi Kabupaten Lamandau 2016/2017

Tabel. 1.11
PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)
Tahun 2012-2016

No.	Lapangan Usaha	PDRB ADH Berlaku (jutaan rupiah)				
		2012	2013	2014	2015	2016
A.	Pertanian, Kehutanan, dan perikanan	703.655,1	712.108,0	789.413,7	848.243,5	933.725,88
	1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	614.737,6	629.205,5	707.759,0	762.217,7	840.621,63
	a. Tanaman Pangan	64.952,4	64.956,8	67.508,9	66.341,5	77.013,59
	b. Tanaman Hortikultura	14.594,8	14.861,3	15.296,9	13.880,3	15.413,80
	c. Tanaman Perkebunan	469.871,9	479.983,8	551.874,7	604.268,7	664.087,76
	d. Peternakan	56.447,7	59.874,0	62.837,8	67.148,7	72.569,04
	e. Jasa Pertanian dan Perburuan	8.870,7	9.529,6	10.240,8	10.578,5	11.537,43
	2. Kehutanan dan Penebangan Kayu	72.752,8	65.838,6	63.695,2	66.280,9	71.097,21
	3. Perikanan	16.164,8	17.063,9	17.959,5	19.744,9	22.007,04
B.	Pertambangan dan Penggalian	426.976,1	520.550,2	494.186,0	493.838,1	461.518,29
	1. Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2. Pertambangan Batubara dan Lignit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3. Pertambangan Bijih Logam	402.369,8	493.792,7	465.480,9	461.750,6	427.081,71
	4. Pertambangan dan Penggalian Lainnya	24.606,3	26.757,5	28.705,1	32.087,5	34.436,58
C.	Industri Pengolahan	293.424,2	297.858,6	337.969,1	368.608,6	406.548,39
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	370,8	391,3	416,2	455,0	512,90
	1. Ketenagalistrikan	326,9	345,2	367,6	403,5	458,91
	2. Pengadaan Gas dan Produksi Es	43,9	46,1	48,6	51,5	53,99
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	579,8	632,2	678,0	728,4	789,10
F.	Konstruksi	263.827,3	285.166,8	316.064,8	347.613,6	384.382,80
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	193.617,4	203.453,8	220.043,1	239.977,9	262.638,22
H.	Transportasi dan Pergudangan	66.295,7	67.645,8	71.155,3	75.148,5	79.645,20
	1. Angkutan Rel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2. Angkutan Darat	36.418,3	38.799,6	42.600,5	46.321,5	50.410,42
	3. Angkutan Laut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	26.604,9	25.297,5	24.729,8	24.660,3	24.662,81
	5. Angkutan Udara	0,0	0,0	0,0		0,0
	6. Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	3.272,5	3.548,7	3.824,9	4.166,7	4.571,98
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	19.125,5	19.563,9	20.243,1	21.052,3	22.009,30
	1. Penyediaan Akomodasi	679,6	725,4	776,6	834,4	905,99
	2. Penyediaan Makan Minum	18.445,9	18.838,5	19.466,5	20.217,9	21.103,31
J.	Informasi dan Komunikasi	29.395,6	32.260,6	35.574,3	38.263,0	41.219,50
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	27.868,4	30.309,4	33.374,7	35.028,5	36.425,63
	1. Jasa Perantara Keuangan	18.288,2	20.091,6	22.459,1	23.908,8	25.004,74
	2. Asuransi dan Dana Pensiun	8.391,4	8.928,8	9.529,2	9.637,3	9.841,98
	3. Jasa Keuangan Lainnya	1.178,6	1.278,7	1.375,9	1.471,7	1.568,00
	4. Jasa Penunjang Keuangan	10,1	10,3	10,5	10,7	10,91
L.	Real Estate	29.591,2	30.897,7	32.507,9	33.849,1	35.580,29
M,N	Jasa Perusahaan	1.059,2	1.162,8	1.269,7	1.392,7	1.526,03
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	122.839,5	128.141,9	135.883,0	147.422,4	159.480,93
P.	Jasa Pendidikan	123.602,4	133.271,1	145.553,1	158.876,3	173.510,81
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	42.978,8	45.894,0	49.193,3	53.731,8	58.714,46
R,S, T,U	Jasa Lainnya	13.471,3	14.396,5	15.752,3	17.053,2	18.480,91
	JUMLAH	2.358.678,3	2.523.704,5	2.699.277,7	2.881.283,0	3.076.708,6

Sumber: Buku Analisis Ekonomi Kabupaten Lamandau 2016/2017

2) Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah gambaran makro mengenai hasil dari proses pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh seluruh *stakeholders*, baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat. Pertumbuhan ekonomi juga merupakan suatu gambaran dari peningkatan pendapatan yang berdampak pada peningkatan kemakmuran dan taraf hidup. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan serta lebih cepat daripada laju pertumbuhan penduduk merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Perekonomian Kabupaten Lamandau pada tahun 2016 mengalami sedikit perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Lamandau tahun 2016 sebesar 6,75 persen, sedangkan tahun 2015 perekonomian mampu tumbuh sedikit lebih baik yaitu sebesar 6,76 persen. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamandau yang melambat ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah yang mengalami perlambatan tahun 2016, yaitu pada poin 6,36 persen.

Kategori Pertambangan dan Penggalian sebagai penyumbang kontribusi terbesar kedua pertumbuhannya mengalami perlambatan yang drastis menjadi -6,55 persen. Kategori Industri Pengolahan mengalami peningkatan menjadi 10,43 persen. Kategori Konstruksi mengalami peningkatan laju pertumbuhan sebesar 10,58 persen. Kinerja kategori lainnya pada tahun 2016 menunjukkan pertumbuhan yang positif. Kategori Pengadaan Listrik dan Gas meskipun memiliki kontribusi yang paling kecil terhadap PDRB ternyata merupakan kategori dengan laju pertumbuhan tertinggi yaitu mencapai 12,72 persen.

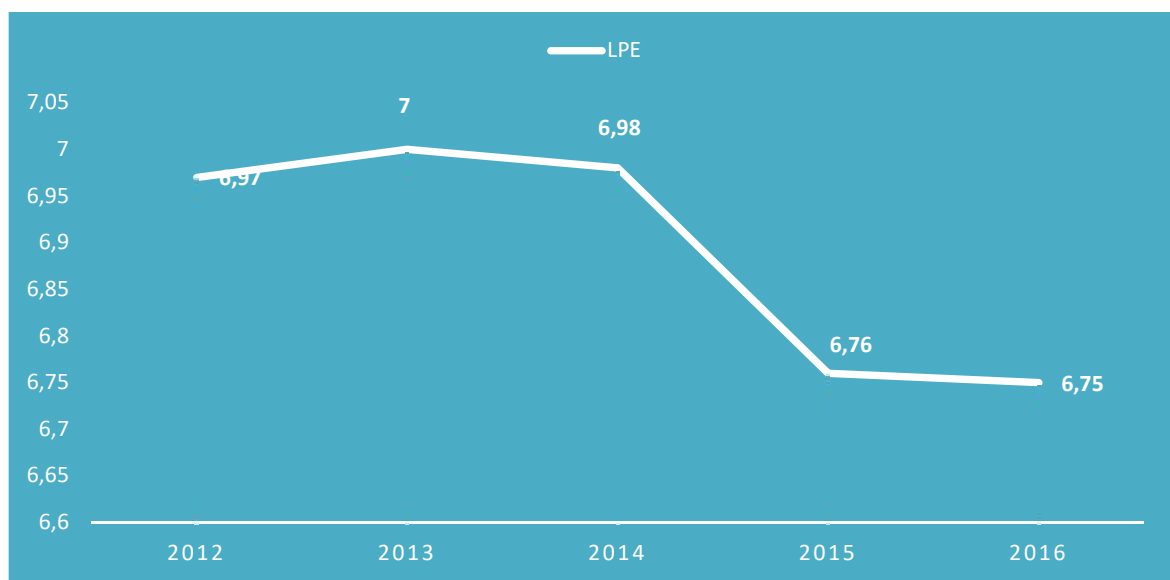
Tabel. 1.12
Pertumbuhan Ekonomi Per Sektor Tahun 2012-2016

No.	Lapangan Usaha	Pertumbuhan Ekonomi (%)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,44	1,20	10,96	7,47	9,96
2.	Pertambangan dan Penggalian	3,38	21,92	-5,07	-0,07	-6,55
3.	Industri Pengolahan	6,97	1,51	13,39	9,00	10,43
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	6,48	5,52	6,37	9,32	12,72
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8,91	9,03	7,25	7,43	8,33
6.	Konstruksi	15,93	8,09	10,84	9,98	10,58
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,46	5,08	8,15	9,29	9,22
8.	Transportasi dan Pergudangan	4,28	2,04	5,19	5,61	5,98
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,20	2,29	3,47	4,00	4,55
10.	Informasi dan Komunikasi	11,57	9,75	10,27	7,56	7,73
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	10,33	8,76	10,11	4,93	4,02
12.	Real Estate	6,31	4,42	5,21	4,13	5,11
13.	Jasa Perusahaan	13,50	9,78	9,20	9,69	9,57
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan	8,50	4,32	6,04	8,49	8,18

No.	Lapangan Usaha	Pertumbuhan Ekonomi (%)				
		2012	2013	2014	2015	2016
	Jaminan Sosial Wajib					
15.	Jasa Pendidikan	7,78	7,82	9,22	9,15	9,21
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,55	6,78	7,19	9,23	9,27
17.	Jasa Lainnya	8,58	6,87	9,42	8,26	8,37
	Total Laju PDRB	6,97	7,00	6,98	6,76	6,75

Sumber: Analisis Ekonomi Kab. Lamandau 2016/2017

Gambar 1.6
Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lamandau
Tahun 2012-2016



Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan masih memiliki andil paling besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamandau pada tahun 2016. Menurut peninjauan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan tengah, secara menyeluruh mencapai pertumbuhan yang positif pada tahun 2016. Walaupun dengan pola yang berbeda-beda, yaitu percepatan pertumbuhan maupun perlambatan pertumbuhan. Hampir setengah dari jumlah kabupaten/kota yang ada di Kalimantan Tengah, yaitu sebanyak enam kabupaten mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016, yaitu Kabupaten Kotawaringin Barat, Lamandau, Seruyan, Pulang Pisau, Murung Raya dan Palangka Raya. Sedangkan sembilan kabupaten/kota lainnya mengalami percepatan.

3) Pendapatan Perkapita

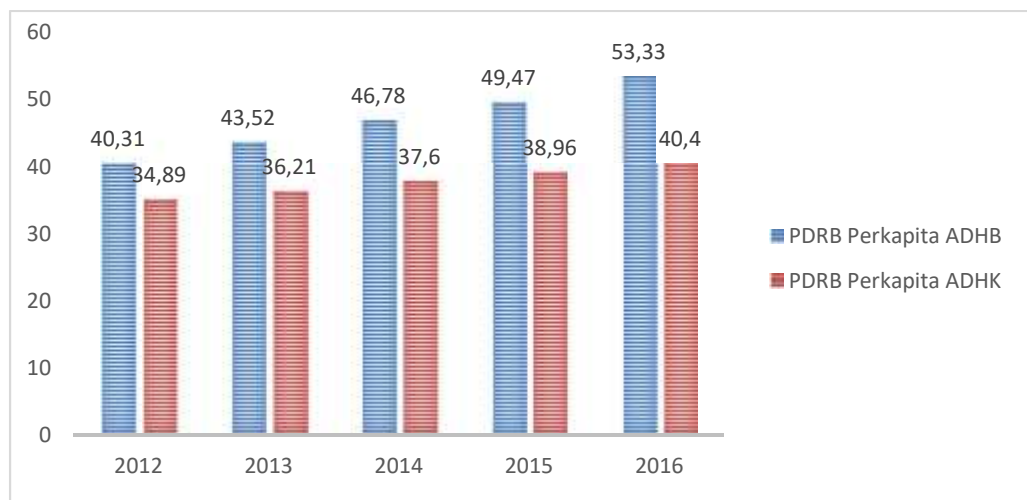
Pendapatan perkapita adalah besaran pendapatan rata-rata penduduk di suatu daerah. Indikator ini dapat dijadikan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan daerah dengan kata lain semakin tinggi/besar pendapatan perkapitanya maka semakin makmur daerah tersebut.

Tabel 1.13
PDRB Perkapita Kab. Lamandau
Tahun 2012-2016

Tahun	Penduduk Kabupaten Lamandau (Jiwa)	PDRB Perkapita			
		Harga Berlaku (Juta Rp.)	Pertumbuhan (%)	Harga Konstan (Juta Rp.)	Pertumbuhan (%)
2012	67.604	40,31	11,38	34,89	3,69
2013	69.704	43,52	7,97	36,21	3,77
2014	71.798	46,78	7,48	37,60	3,86
2015	73.975	49,47	5,74	38,96	3,62
2016	76.160	53,33	7,80	40,40	3,69

Sumber: BPS Kabupaten Lamandau Tahun 2017

Gambar 1.7
Diagram PDRB Perkapita (Juta Rupiah) Kabupaten Lamandau
Tahun 2012-2016



Dengan mengetahui pertumbuhan PDRB Per kapita ADHK Kabupaten Lamandau, maka akan terlihat pertumbuhan nyata atau pertumbuhan riil ekonomi per kapita penduduk Kabupaten Lamandau. Nilai PDRB per kapita atas dasar harga konstan maupun berlaku menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan pendapatan masyarakat dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Bila dibandingkan, PDRB Perkapita ADHB Kabupaten Lamandau selama tahun 2012 - 2016 selalu berada diatas Provinsi Kalimantan Tengah. Pada tahun 2016 PDRB Perkapita ADHB, Kabupaten Lamandau sebesar Rp. 53,33 Juta sedangkan Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp. 40,60 Juta.

4) Angka Kemiskinan

Proses pembangunan yang dinilai cukup berhasil dan mampu menghasilkan kemajuan perekonomian Kabupaten Lamandau tentunya memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Indikasi peningkatan kesejahteraan tersebut dapat dilihat dari menurunnya angka kemiskinan Kabupaten Lamandau.

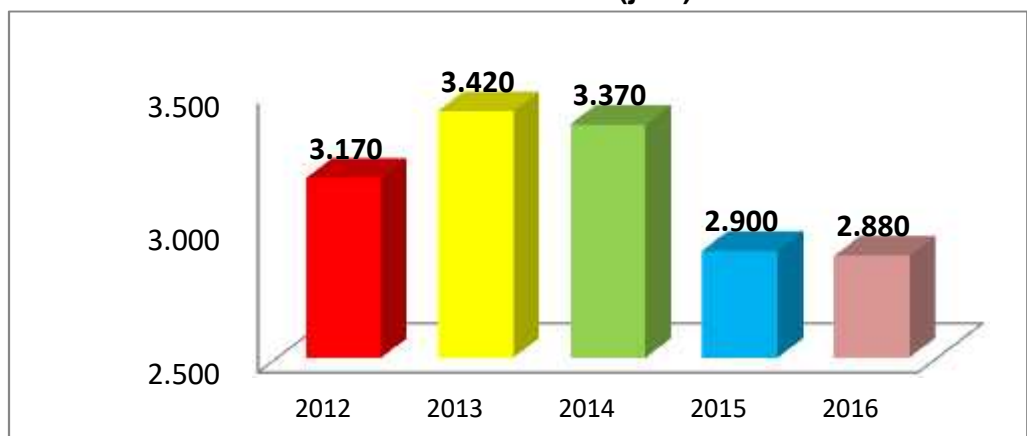
Penduduk miskin di Kabupaten Lamandau selama tahun 2012 – 2016 mengalami penurunan, yaitu sebesar 3.200 jiwa pada tahun 2011, turun menjadi 2.880 jiwa di tahun 2016, atau terjadi penurunan sebesar 320 jiwa dalam kurun waktu lima tahun, dengan tingkat kemiskinan yang juga mengalami penurunan yaitu tahun 2012 sebesar 4,66% turun menjadi 3,80% di tahun 2016, atau selama jangka waktu lima tahun tingkat kemiskinan Kabupaten Lamandau turun sebesar 0,86%.

Tabel. 1.14
Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan
Kabupaten Lamandau Tahun 2012-2016

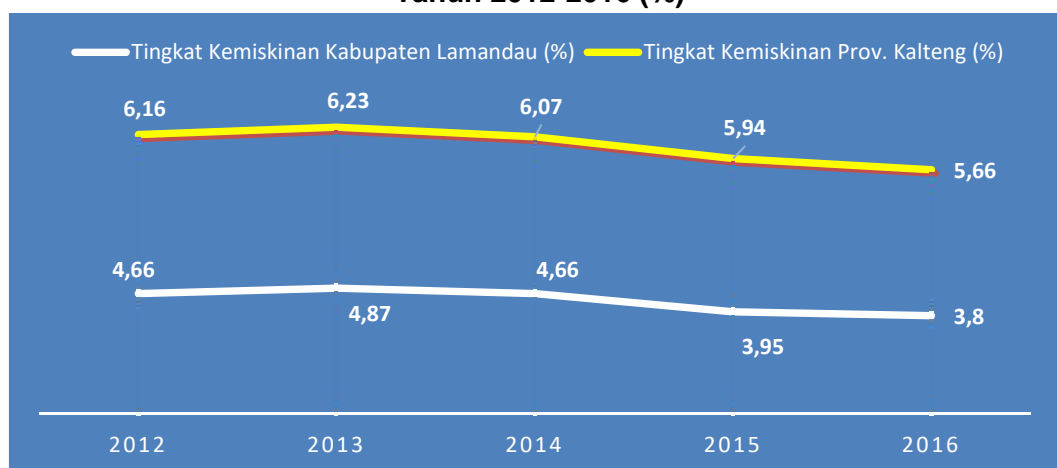
No.	Tahun	Penduduk Miskin (Jiwa)	Tingkat Kemiskinan (%)
1.	2012	3.200	4,66
2.	2013	3.400	4,87
3.	2014	3.370	4,66
4.	2015	2.900	3,95
5.	2016	2.880	3,80

Sumber: Data Pokok Pembangunan Kabupaten Lamandau 2016/2017

Gambar 1.8
Diagram Jumlah Penduduk Miskin Kab. Lamandau
Tahun 2012 – 2016 (jiwa)



Gambar 1.9
Grafik Tingkat Kemiskinan Kabupaten Lamandau
Tahun 2012-2016 (%)



Sumber: Data Pokok Pembangunan Kabupaten Lamandau 2016/2017

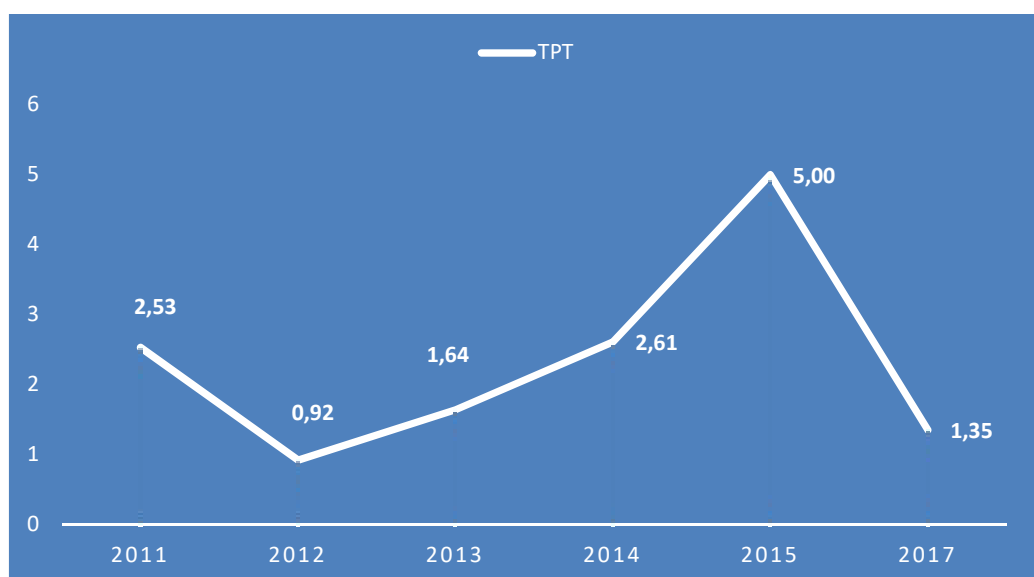
Bila dibandingkan dengan persentase penduduk miskin Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah, pada tahun 2016 Kabupaten Lamandau dengan persentase kemiskinan sebesar 3,80 persen berada di posisi ketiga terendah setelah Kota Palangka Raya (3,75 persen) dan Kabupaten Sukamara (3,73 persen), sementara persentase penduduk miskin Kabupaten Lamandau berada dibawah Provinsi Kalimantan Tengah (5,66 persen).

5) Tingkat Pengangguran Terbuka

Salah satu indikator makro ekonomi adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang menunjukkan tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Indikator ini digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian, selain angka kemiskinan. TPT diukur sebagai persentase jumlah penganggur/pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja. TPT menggambarkan seberapa banyak angkatan kerja yang sedang aktif mencari pekerjaan, pengertian menganggur adalah aktif mencari pekerjaan. Angka TPT Kabupaten Lamandau dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 selalu mengalami penurunan. Namun pada tahun 2013 angka TPT mulai meningkat hingga tahun 2015 disebabkan adanya pergeseran dari bukan angkatan kerja menjadi angkatan kerja yang didominasi oleh lulusan SMA/SMK.

Pada tahun 2016 data TPT tidak tersedia dan pada tahun 2017 terjadi penurunan yang signifikan angka TPT sebesar 1,35% karena adanya pertumbuhan ekonomi yang ditopang dengan stabilitas harga serta upaya sinergitas peningkatan kualitas dan ketrampilan tenaga kerja.

Gambar 1.10
Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Lamandau
Tahun 2011-2017



Sebagaimana terlihat dalam grafik, data TPT tahun 2016 tidak tersaji karena data survey untuk angkatan kerja nasional tahun 2016 tidak

dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Pelaksanaannya dilakukan sekaligus pada tahun 2017 sehingga data TPT untuk Kabupaten/Kota seluruh Indonesia tidak tersedia.

Bila dibandingkan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah, pada tahun 2017 Kabupaten Lamandau dengan TPT sebesar 1,35 persen berada di posisi kedua setelah Gunung Mas (1,17 persen). Besaran TPT Kabupaten Lamandau tahun 2017 relatif berada di bawah Provinsi Kalimantan Tengah (4,23 persen).

6) Laju Inflasi

Inflasi adalah suatu keadaan perekonomian dimana harga-harga barang-barang pokok masyarakat secara umum mengalami kenaikan dalam waktu yang panjang, dan juga dapat diartikan turunnya daya jual mata uang suatu negara. Kenaikan harga yang bersifat sementara seperti kenaikan harga pada masa lebaran tidak dianggap sebagai inflasi, karena disaat setelah masa lebaran, harga-harga dapat turun kembali. Disamping itu, kenaikan harga dari satu atau dua barang/jasa saja belum dapat dikatakan inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut telah meluas (atau mengakibatkan kenaikan) sebagian besar dari harga barang dan jasa lain.

Perhitungan inflasi di setiap kabupaten/kota saat ini menjadi sangat penting, terlebih lagi dengan adanya Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Namun, secara resmi perhitungan inflasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) saat ini hanya meliputi 82 kota se-Indonesia, termasuk Sampit dan Palangka Raya, tidak termasuk Nanga Bulik. Dengan keterbatasan data yang tersedia, perhitungan inflasi di luar cakupan kota SBH (Survei Biaya Hidup) 2012 dapat dilaksanakan, salah satu caranya dengan memanfaatkan data hasil SBH 2012 yang tersedia di Kota terdekat.

Inflasi Nanga Bulik cenderung mengikuti inflasi Sampit sebagai kota rujukan/acuan data hasil SBH, bukan Palangka Raya. Hal ini disebabkan Sampit sebagai mitra kota (*sister city*) memiliki kemiripan pola konsumsi, adat dan budaya karena letak geografisnya yang berdekatan.

Secara Nasional laju inflasi pada tahun 2015 sejumlah 3,35%, dan pada tahun 2016 sejumlah 3,02%. Sedangkan laju inflasi di Kabupaten Lamandau pada tahun 2016 menunjukkan tekanan inflasi yang menurun pada triwulan IV 2-16 dengan tingkat inflasi year on year sejumlah 2,46%. Pada triwulan yang sama inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah tercatat sebesar 2,11% atau menurun dibandingkan dengan realisasi inflasi pada triwulan sebelumnya sebesar 3,18%.

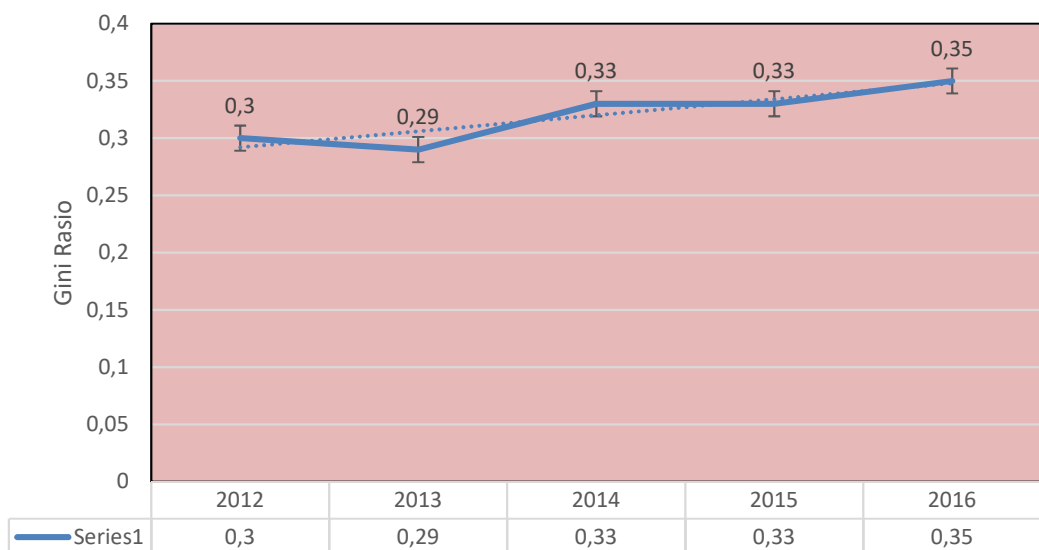
7) Distribusi Pendapatan Penduduk

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu indikator dari keberhasilan pembangunan. Namun pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut harus dibarengi dengan pemerataan pendapatan masyarakat, sehingga hasil-hasil pembangunan tersebut dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini menjadi penting karena sering terjadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak diikuti oleh pemerataan pembagian “kue” pembangunan. Sehingga bagi kelompok yang berpenghasilan tinggi akan semakin kaya dan yang berpenghasilan rendah akan semakin miskin yang berdampak pada kesenjangan sosial.

Untuk mengukur itu semua, penghitungan distribusi pendapatan dan Gini Rasio (GR) sangat diperlukan. Tujuan penghitungan distribusi pendapatan dan GR adalah untuk mendapatkan data/informasi tentang besarnya ketimpangan pendapatan masyarakat dan tingkat pemerataannya.

Secara umum pada tahun 2016 ketimpangan pendapatan yang terjadi di Kabupaten Lamandau relatif sedang. Namun, untuk mengetahui ketimpangan pendapatan yang sebenarnya terjadi di Kabupaten Lamandau kita harus melihat perubahan ketimpangan pendapatan dari tahun ke tahun.

Gambar 1.11
Gini Rasio Kabupaten Lamandau
Tahun 2012-2016



Dalam lima tahun terakhir ketimpangan pendapatan tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 0,35. Ketimpangan pendapatan Kabupaten Lamandau pada tahun 2012 sampai dengan 2016 masih berada pada kategori ketimpangan pendapatan rendah sampai dengan sedang. Meskipun ketimpangan pendapatan Kabupaten Lamandau pada tahun 2016 masih berada pada kategori sedang.

Tabel 1.15
Distribusi Pendapatan Menurut Kriteria Bank Dunia
di Kabupaten Lamandau

No.	Kelompok Penduduk	Total Penduduk
1.	40% Penduduk Berpenghasilan Rendah	20,18
2.	40% Penduduk Berpenghasilan Menengah	36,91
3.	20% Penduduk Berpenghasilan Tinggi	42,91

Sumber : *Distribusi Pendapatan Kabupaten Lamandau 2016/2017*

Berbeda dengan hasil Gini Ratio, berdasarkan kriteria Bank Dunia, tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Lamandau **masih rendah** karena proporsi pengeluaran penduduk 40% terendah masih di atas 17%.

Tabel 1.16
Kelompok Penduduk dengan Pendapatan 40 Persen Terendah
berdasarkan Status/Kedudukan dalam Pekerjaan di kabupaten Lamandau
Tahun 2016

No.	Status Pekerjaan	Persentase
1.	Berusaha sendiri	34%
2.	Berusaha dengan dibantu pekerja keluarga/Tidak dibayar/Buruh tidak tetap	20%
3.	Berusaha dengan dibantu buruh/Pekerja tetap	1%
4.	Buruh/Karyawan/Pegawai	33%
5.	Pekerja bebas	125
6.	Pekerja keluarga/Tidak dibayar	0%

Sumber : *Distribusi Pendapatan Kabupaten Lamandau 2016/2017*